

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Truk Pengangkut Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang bisa diketahui dalam mengalokasikan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir jika disesuaikan dengan volume sampah yang ada pada saat ini, maka perlu dilakukan penambahan jumlah truk pengangkut sampah karena volume sampah semakin meningkat, jarak ke tempat pembuangan akhir yang berbeda dan waktu pengangkutan terbatas. Hal ini mengakibatkan kekurangan truk pengangkut sampah. Berdasarkan hasil penelitian truk pengangkut sampah yang dibutuhkan berjumlah 19 truk. Sedangkan truk yang beroperasi saat ini sebanyak 4 (empat) truk. Maka pemerintah daerah Kabupaten Sikka perlu menyiapkan anggaran untuk pengadaan 15 (lima belas) truk baru. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan 15 truk dengan model/type Hino Dutro MD-L 6 roda adalah sebesar Rp 4.836.000.000.
2. Hasil penelitian tersebut juga memperhatikan aspek kelayakan investasi dari segi teknis, sosial budaya, dan pendistribusian. Perhitungan truk pengangkut sampah yang dibutuhkan sudah mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan, menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini juga memperhatikan keputusan investasi yang

perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum menyadari untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah nonorganik. Sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS) merupakan sampah yang tidak dipisahkan sehingga dalam waktu pengangkutan oleh petugas pengangkutan sampah mengalami kendala.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka perlu memperhatikan Investasi (Belanja Modal) Pengadaan Truk Sampah yang telah dilakukan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini.
2. Melihat jumlah truk yang dibutuhkan saat ini berjumlah 19 (Sembilan belas) yang ada pada saat ini 4 (empat) truk, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka perlu mengadakan lagi truk sebanyak 15 (lima belas) truk. Perhitungan truk yang dibutuhkan saat ini memperhatikan aspek kelayakan investasi dari segi teknis, sosial budaya, dan pendistribusian.
3. Pemerintah Kabupaten Sikka perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp 4.836.000.000. untuk pembelian 15 unit truk pengangkutan sampah.
4. Masyarakat perlu memisahkan antara sampah organik dan sampah nonorganik. Pemisahan perlu dilakukan agar pada saat pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) truk tidak perlu mengalami kendala waktu pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Omarsakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Pertama. Jakarta : Selemba Empat.
- Halim, Abdul. 2011. Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian Dengan Anggaran Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang :*Jurnal Akuntansidan Keuangan Daerah*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2011. Hal 1- 11.
- <https://kumparan.com/florespedia/inginkan-kota-maumere-bersih-dan-indah-tapi-armada-pengangkut-sampah-minim-1uWP59fYSKw>. Diakses pada 10 Maret 2021.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : STIE YKPN.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Penentuan Harga Pelayanan Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Nadyasa, Mayun, dkk. 2009. Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amlapura. Denpasar :*Jurnal Ilmiah*, Volume 13, No 2, Juli 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No 59 dan Permendagri No 21 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ratmono Dwidan Mahfud Solin. 2015. *Akuntansi Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta : YKPM.
- Wilhelmus Mustari dan Abdul Halim. 2008. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKN. Yogyakarta.
- www.oto.com